BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep pembangunan yang dipraktekkan sejak 1966 di Jawa Barat mendasarkan pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor utama, terutama minyak dan sumberdaya mineral. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi sejak itu melesat hingga berkisar pada 7 persen per tahun. Dari salah satu provinsi termiskin di Indonesia, pendapatan per kapita Jawa Barat meningkat hingga di atas $500 per tahun, bahkan sekitar $1,000 menjelang terjadinya krisis ekonomi.

Krisis ini mempertanyakan kembali sendi-sendi pembangunan di Jawa Barat. Jawaban singkat "karena *oil boom*" ternyata tumbuh negatif atau dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Dengan demikian, timbul pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini.

Sementara itu, sejak tahun 1972 Jawa Barat telah ikut serta dalam proses pendefinisian kembali hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Menteri Lingkungan Jawa Barat pertama, Prof. Emil Salim, bahkan ikut serta sebagai anggota Komisi Brundtland yang menyusun buku putih pembangunan berkelanjutan Hari Depan Kita Bersama (*Our Common Future*). Buku ini sampai sekarang masih menjadi acuan utama diskursus pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

Pada tahun 1992, Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) - dikenal juga dengan KTT Bumi - menelurkan beberapa dokumen penting mengenai pembangunan berkelanjutan, yaitu Piagam Bumi (*Earth Charter*) dan Agenda 21 yang merekomendasikan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada bulan September 2002, tahun depan, hasil-hasil dari Agenda 21 selama satu dekade akan dievaluasi, sementara pelajaran yang dapat ditarik darinya akan dipergunakan untuk menuntun kerangka perencanaan pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan. Pengembangan pembangunan di sektor energi dan sumberdaya mineral terhadap berkelanjutannya pembangunan di Jawa Barat.

Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi di mana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi seperti mesin-mesin (*capital*), pekerja (*labor*, atau *human resources*), dan lain-lain. Pada prosesnya, pembangunan membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan saat ini yang tidak mengurangi kesempatan dari generasi mendatang untuk membangun. Secara statik pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan

yang secara serentak membangun ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak boleh berdampak pada pengrusakan pranata sosial dan lingkungan.

Dampak sosial dari ekstraksi pengembangan pembangunan energi seperti minyak, gas, dan mineral akhir-akhir ini semakin banyak disoroti Indonesia. Pertama, kegiatan ekstraksi ini biasanya memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, tetapi tidak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ekstraksi. Kegiatan ekstraksi ini biasanya dilakukan dalam bentuk enclave, tanpa ada upaya mengintegrasikan dengan kegiatan sosial-ekonomi di sekitarnya. Sumbangan sektor energi dan sumberdaya mineral terhadap kerekatan sosial di Jawa Barat dapat diukur melalui indikator-indikator berikut ini.

Energi dan sumberdaya mineral memiliki dampak lingkungan dalam bentuk polusi dan penipisan sumberdaya alam. Pada proses di mana pertambangan terjadi di tempat-tempat yang ekosistemnya rentan (misalnya pertambangan di wilayah hutan lindung), maka eksploitasi sumberdaya energi dan mineral akan berdampak pada ekosistem tersebut. Dampak lingkungan ini terjadi baik pada saat penambangan (minyak, gas bumi, dan mineral), pengolahannya, pengangkutannya, transformasinya dari energi primer menjadi energi sekunder, serta penggunaannya oleh konsumen di berbagai sektor. Dampak lingkungan dari proses ekstraksi di antaranya adalah masalah tailing, pencemaran hidrokarbon, merkuri, dan bahan

beracun dan berbahaya (B3) lainnya di laut dan sungai, serta masalah lainnya.

Selain peranannya yang penting sebagai penghasil devisa melalui ekspor, sektor minyak dan gas memiliki peran yang penting sebagai sumber energi, di mana ketersediaannya masih bergantung kepada sumber-sumber yang tidak terbarukan energi seperti minyak, gas, dan batu-bara. Sumber-sumber terbarukan seperti panas bumi, biomasa, air, angin, dan tenaga matahari belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, pasokan energi domestik akan terancam dengan terancamnya keberlanjutan produksi energi primer yang tidak terbarukan ini. Sebagai sumber energi yang dibutuhkan pembangunan, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi panduan dalam evaluasinya.

Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pembangunan yang ada, pendapatan dari sumber-sumber tak-terbarukan seperti minyak, gas, dan mineral harus ditanam kembali untuk memperbesar modal pembangunan dari sumber-sumber terbarukan seperti panas bumi, angin, air, serta sumber daya manusia.

Bidang Listrik Pemanfaatan Energi khusunya di jawa barat peningkatannya sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur dinas energi dan sumber daya mineral di Jawa Barat. Kemampuan menunjukkan potensi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk bekerja giat dan mengerjakan pekerjaannya.

Persyaratan yang sangat mendasar bagi aparatur adalah kemampuan intelektual dengan motivasi kerja yang tinggi sehingga tercipta kinerja aparatur yang kondusif untuk merealisasikan potensi kerja yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peran yang begitu besar dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku utama dan merupakan *input* dari proses produksi dalam pembangunan akan tercapai apabila faktor-faktor penunjang optimalisasi peran tersebut tercapai. Salah satu faktor yang menentukan peran SDM adalah kinerja. Aparatur dalam organisasi atau perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik diharapkan akan mempunyai kontribusi positif terhadap organisasi. Kinerja aparatur sangat ditentukan oleh seberapa baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur dan memfasilitasi pencapaian kinerja mereka.

Tuntutan masyarakat terhadap transparasi penyelenggaraan pembangunan semakin tinggi, terlebih lagi pascareformasi sejak tahun 1997. Akuntabilitas dan transparasi memang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pembangunan. Bentuk tuntutan tentang akuntabilitas dan transparasi dalam organisasi adalah kualitas kinerja pelayanan publik karena misi organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Semakin tingginya tuntutan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan tersebut, pemerintah telah meresponnya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Lakip merupakan sistem pengukuran dan penilaian kinerja berdasarkan *self-assesment*. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pengukuran dan penilaian sendiri terhadap kinerja instansinya. Keakuratan dan standarisasi pengukuran menjadi hal mutlak diperlukan agar ada jaminan terhadap kebenaran dan keakuratan hasil penilaian itu. Kinerja organisasi tidak akan terpacu untuk berkembang jika sistem tidak akurat dan standar pengukuran tidak tepat atau lemah.

Masyarakat menyikapi tuntutan dari pemerintah menggeser paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep sentralisasi ke konsep desentralisasi yang diwujudkan oleh penggantian UU Nomor 5 Tahun 1974 oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti lagi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang yang terbaru di keluarkan oleh pemerintah UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dari perubahan kebijakan itu, antara lain adanya perubahan format dan struktur kelembagaan daerah. Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerah baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam khususnya Bidang Listrik Pemanfaatan Energi.

Guna dalam pengembangan pembangunan energi dan sumberdaya mineral yang berada di dinas ESDM Jawa Barat, penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai kinerja aparatur ESDM Jawa Barat. Untuk itu penulis

mengambil judul **“Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah proses pembahasan penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keluaran Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Kaitan Usaha dengan Pencapaian Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana Informasi Penjelas Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui keluaran yang dilaksanakan yang dapat menentukan keberhasilan Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui hasil Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Kaitan Usaha dengan Pencapaian dalam menjalankan Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui Informasi Penjelas yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Bidang Listrik Dan Pemanfaatan Energi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan KKL

Kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Guna teoritis, dalam rangka mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori melalui penulisan ke lapangan. Dimana dalam penulisan ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penulisan serupa dimasa yang akan datang.

2. Guna praktis, untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bidang listrik dan pemanfaatan energi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Baban Sobandi dan kawan-kawan Kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit, maupun impact*. (Sobandi dkk, 2006:176). Hasil kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit,* maupun *impact* dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur suatu kinerja birokrasi publik, yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah* sebagai berikut:

1. Keluaran
2. Hasil
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4. Informasi Penjelas

(Sobandi dkk, 2006 : 179-181)

Pertama*, output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kedua*,* hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan.segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah

oleh suatu organisasi atau instansi harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut.

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan 15 memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara.

Keempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyempurnakan suatu kegiatan harus didasari dengan rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan.

Peningkatan pelayanan kinerja aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar terciptanya kualitas suatu kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umunya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penulisan laporan KKL ini adalah :

1. Kinerja adalah merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit, maupun impact.*
    1. *Output* adalah sesuatu hasil yang dihasilkan langsung dirasakan dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik *Output* Meliputi:
        a) Kualitas Pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur
        b) Kuantitas pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kuantitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur
    2. Hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang diberikan dalam pemberian layanan. Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau

dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung

dari kegiatan tersebut.

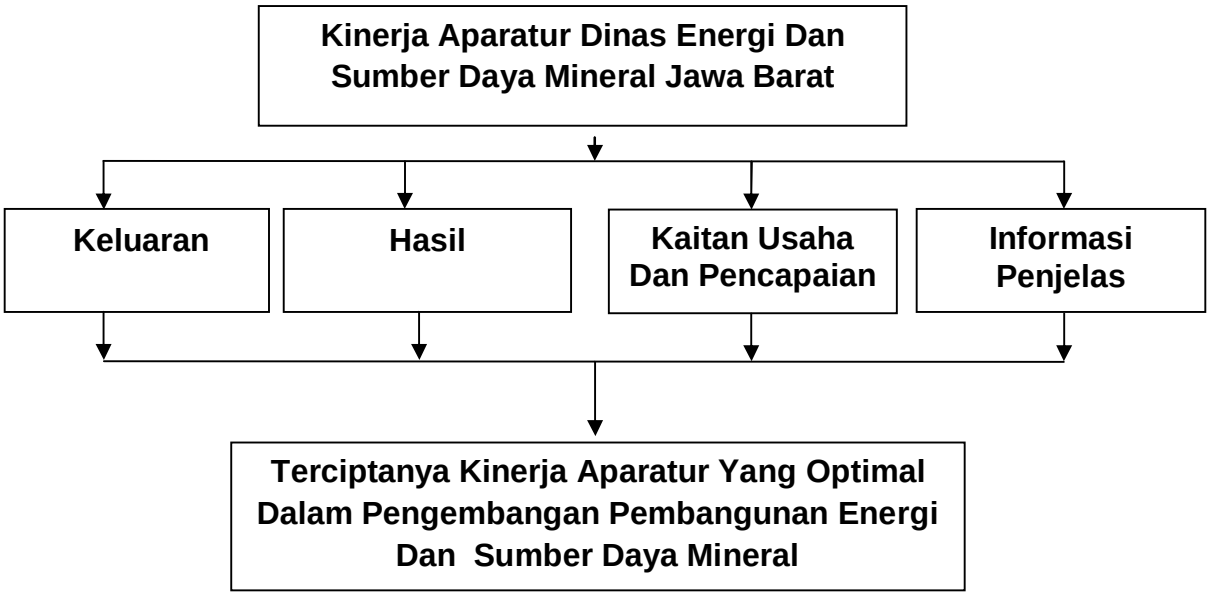
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian adalah mengukur sumber daya yang digunakan oleh aparatur dan memberi informasi dari hasil penggunaan sumber daya tersebut yang membandingkan hasil yang dicapai sekarang dengan hasil yang sebelumnya secara internal, norma atau standar yang bias diterima atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara. Kaitan usaha dengan pencapaian meliputi:
   a) Efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan adalah mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima, atau hasil yang bias dicapai oleh organisasi yang setara.
   b) Biaya yaitu hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan. Ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bias mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

4. Informasi Penjelas adalah suatu hasil berupa informasi yang ada dan disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif yang bisa membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Informasi penjelas meliputi :
   a. Faktor Subtansial adalah faktor yang ada diluar kontrol, seperti karateristik lingkungan dan demografi.
   b. Faktor yang dapat dikontrol adalah faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

2. Aparatur adalah seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian untuk mencapai tujuan.

Adapun model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Metode Laporan KKL

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai berikut :

> "Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing". (Surakhmad, 1998 : 139)

Dengan demikian metode deskiptif, mendata atau mengelompokan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang

ada. Informasi deskriptif dalam kegiatan ilmiah akan memperlihatkan bahwa jalan dari suatu fakta menuju suatu fakta ilmiah adalah sebuah jalan yang sadar.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Observasi, melakukan pengamatan atas perilaku seseorang dengan mendengarkan berbagai ucapan mengenai berbagai ragam soal pada aparatur pemerintahan. Pengamatan dilakukan terhadap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat, mengenai bagaimana kewenangan kewenangan yang diberikan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari tiap SKPD atau dalam mengoperasionalkan sistem.
2. Studi Pustaka, mencari, memilah dan membaca buku-buku, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan usaha-usaha dalam pengelolaan data sumber-sumber pendapatan daerah.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (*Setting*) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari

pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data (Bagong Suyanto,2005:183).

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulisan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Secara operasional teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model analisis data.

Pertama, reduksi data didapat di lapangan langsung di ketik atau ditulis langsung dengan rapi, terperinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penulisan, laporan perlu di reduksi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan.

Kedua, *display* data data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

Ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan hipotes. Jadi dari data yang didapat mencoba untuk mengambil kesimpulan.

Laporan penulisan kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penulisan

Lokasi penulisan ini dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat Jln. Soekarno-Hatta No. 576 Telepon (022) 7562049, Fax (022) 7562048.

Jadwal penulisan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jadwal Penulisan

WAKTU / KEGIATAN	Tahun 2011				
	Juni	Juli	Agust	Sept	Nov
Pemilihan Lokasi KKL					
Bimbingan UP Laporan KKL					
Pelaksanan KKL					
Bimbingan Laporan KKL dengan dosen pembimbing masing-masing					
Pengumpulan Laporan KKL					